

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>
Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 26 (1), 2022, 1-22

Membangun Kemitraan Strategis Melalui Analisis Multi Pihak Pada Sistem Penyuluhan Agama Di Tangerang Selatan

Artiarini Puspita A.; Tasman; M. Taufik Hidayatulloh.
art.puspita@uinjkt.ac.id; tasman.ppim@uinjkt.ac.id;
taufikmtht76@gmail.com

Abstrak:

Kelembagaan di bidang dakwah utamanya kelembagaan penyuluhan agama akan mengalami tantangan berat dengan semakin banyaknya permasalahan inter umat dan antar umat. Penyuluhan agama itu sendiri merupakan bagian kecil dari dakwah yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan religious social engeneering. Karena itu, penyuluhan agama dituntut untuk lebih berperan dalam membentuk pola perilaku keagamaan tertentu dari masyarakat sebagai syarat untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupan. Namun, apakah fungsi kelembagaan tersebut sudah efektif atau belum masih perlu pengkajian lebih lanjut.

Kajian ini didasarkan pada teori sistem penyuluhan agama yang valid dan data baru tentang pelaksanaan penyuluhan agama selama ini. Penelitian ini menguraikan komponen sistem penyuluhan agama berdasarkan kebutuhan stakeholders penyuluhan dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan interaktif Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems (RAAKS) yang dimodifikasi sesuai karakteristik sistem penyuluhan agama. Metode ini memberikan gambaran tentang perlunya partisipasi aktif semua aktor, terutama dalam hal pendefinisian masalah, analisis situasi serta identifikasi tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam sistem penyuluhan agama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan kunci, diskusi dengan informan terpilih dan kajian analisis terhadap kapasitas sistem penyuluhan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyuluhan agama terdiri dari subkomponen sistem penyuluhan agama yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Hubungan antar subsistem penyuluhan agama yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan memiliki peluang untuk saling bekerja sama dapat meningkatkan sistem penyuluhan agama.

Kata Kunci: analisis multipihak, kemitraan strategis, sistem, sistem penyuluhan, RAAKS, penyuluhan agama

Abstract:

Institutions in the field of da'wah, especially religious counseling institutions, will experience serious challenges with the increasing number of intercommunity and intracommunity problems. Religious counseling itself is a small part of da'wah that can be used as a tool to carry out religious social engineering. Therefore, religious counseling is required to play a greater role in shaping the pattern of certain religious behavior of the community as a condition to be able to improve the quality of life. However, whether has this institutional function been effective or not still needs further study. This study is based on a valid theory of religious counseling system and new data on the implementation of religious counseling.

This study describes the components of the religious counseling system based on the needs of counseling stakeholders in providing religious services to the community. This study applies the Interactive Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems (RAAKS) approach which is modified according to the characteristics of the religious extension system. This method provides an overview of the need for active participation of all actors, especially in terms of problem definition, situation analysis and identification of challenges and opportunities to improve institutional performance in the religious extension system. Data was collected through interviews with key informants, discussions with selected informants and analysis studies on the capacity of the religious counseling system. The results show that the religious counseling system consist of subcomponents of the religious counseling system that had potential to be developed. The relationship between religious counseling subsystems that are dependent on each other and have the opportunity to work together can improve the religious counseling system.

Keywords: multi-stakeholder analysis, strategic partnership, system, extension system, RAAKS, religious extension.

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwah.v26i1.28817>

Pendahuluan

Dinamika lembaga di masa lalu akan mengalami evolusinya pada masa sekarang baik karena masalah kultural maupun faktor kebutuhan dalam menyesuaikan dengan kondisi masyarakat penggunaannya. Namun yang jelas, bahwa kelembagaan di masa mendatang akan mengalami perubahan

secara berkelanjutan sebagai akibat perubahan-perubahan lingkungan yang mengitarinya. Asumsi tersebut mengindikasikan akan semakin banyaknya jumlah lembaga selain tentunya juga semakin besar scope kelembagaan tersebut. Dengan demikian, lingkungan yang mengitari suatu lembaga akan semakin padat dan penuh

persaingan. Oleh sebab itulah mutlak diinisiasi sebetuk kerjasama agar persaingan antara *stakeholders* kelembagaan dapat direduksi selain juga agar terhindar dari overlappingnya kinerjanya demi melayani kebutuhan masyarakatnya.

Terkait dengan kelembagaan di bidang dakwah utamanya kelembagaan penyuluhan agama ke depan, akan mengalami tantangan berat dengan semakin banyaknya permasalahan inter umat dan antar umat. Seperti pernah disebutkan bahwa masalah eksternal yang bersentuhan dengan bimbingan masyarakat adalah masalah aliran sesat dan radikalisme. Belum tentu banyaknya lembaga dakwah yang banyak akan menjadi jaminan tertanganinya semua urusan umat apalagi dalam realitanya antara satu lembaga dengan lembaga lainnya tidak terkoneksi dengan program programnya yang egosektoral.¹

Penyuluhan agama merupakan bagian kecil dari dakwah yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan *religious social engeneering*. Maka dari itu, penyuluhan agama dituntut untuk lebih berperan dalam membentuk pola perilaku keagamaan tertentu masyarakat sebagai syarat untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupannya menjadi lebih baik. Pendekatan ini meniscayakan perubahan perilaku yang bermuara pada terpecahkannya masalah menuju pribadi yang berkualitas dan bermartabat.² Penjelasan ini mengandung beberapa implikasi yang kesemuanya itu ditekankan pada:

1. Penyuluhan agama bukan tugas yang ringan (yaitu berupa aktivitas ceramah, do"a atau melayani konsultasi) melainkan semua upaya yang dapat menimbulkan perbuatan

konkrit masyarakat. Tujuan itu apa lagi kalau bukan disebut sebagai pembangunan masyarakat.

2. Penyuluhan agama tidak hanya sebatas *transfer of knowledge* melainkan sudah saatnya beralih pada *community/organisation/group participation*.
3. Penyelenggaraan penyuluhan agama perlu kembali kepada filosofi menolong orang-orang untuk menolong dirinya sendiri melalui suatu upaya pendidikan yang demokratis dan humanistik.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah memperhatikan masalah penyuluhan agama ini menjadi masalah yang penting. Bidang tugas dan organisasinya terbentuk dari tataran pusat di bawah kendali Direktorat Penerangan Agama Islam, di tingkat provinsi di bawah koordinasi Kepala Bidang Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan mesjid, sampai dengan tingkat bawah di kabupaten seluruh Indonesia di bawah pengendalian Kepala Seksi Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Mesjid atau Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Sesuai tipologinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait).

Namun demikian, fungsi tersebut menurut kelembagaannya selama ini apakah sudah efektif atau belum masih perlu pengkajian lebih lanjut. Kajian dimaksudkan perlu dilakukan selain didasarkan pada teori sistem penyuluhan agama yang valid, perlu didukung pula oleh data terbaru tentang pelaksanaan penyuluhan agama selama ini yang berjalan. Dalam penelitian ini akan mencoba menguraikan komponen sistem

penyuluhan agama berdasarkan kebutuhan *stakeholders* penyuluhan dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

Pendekatan sistem telah menimbulkan dampak besar dalam kelembagaan untuk menjadi lembaga yang efektif dan efisien—tidak terkecuali dengan kelembagaan penyuluhan. Sebagaimana dapat dilihat dampak signifikan lembaga yang memiliki kinerja yang dinamis seperti penyuluhan pertanian di Amerika Serikat yang mengarah pada arti keekonomian.³ Hal ini menandakan bahwa sistem penyuluhan memiliki implikasi yang sedemikian penting diterapkan. Dalam penyuluhan agama, hasil penyuluhan dengan menggunakan bahasa agama ini akan berkorelasi positif dengan penyuluhan agama yang tersistem. Setidaknya dalam melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dan dinamika sosial. Dua hal keuntungan dengan penerapan pendekatan sistem penyuluhan, yaitu adaptasi dan mitigasi. Hal tersebut dicapai melalui penggunaan teknologi dan manajemen informasi, pengembangan kapasitas dan fasilitas, pengantara serta penerapan berbagai kebijakan dan program.⁴

Sehubungan dengan itu dipandang penting untuk mengadakan telaahan khusus tentang kemungkinan penerapan pendekatan sistem yang sesuai dalam kelembagaan penyuluhan agama di tingkat kabupaten. Kegiatan mana selanjutnya diisi dengan membuat pengamatan berbagai subsistem yang terpisah-pisah yang sebenarnya ada dan mencatat tingkat kontribusi tiap subsistem terhadap sistem secara keseluruhan termasuk titik kelemahan tiap subsistem yang dapat diubah menjadi

kekuatan sistem penyuluhan agama. Maka dari itu, tema sistem penyuluhan agama menjadi tema penting dalam kajian ini dan di saat yang sama telah menjadi tema menarik untuk ditelaah.

Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memberikan suatu hasil studi dan telaah sistem penyuluhan agama yang dapat diterapkan pada masyarakat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan kelompok sasaran penyuluhan agama di wilayah. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa saja komponen sistem penyuluhan agama berdasarkan kebutuhan *stakeholders* penyuluhan dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat? Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran beragama masyarakat?; dan Kebijakan apa yang dapat diajukan untuk lebih mengoptimalkan kinerja kelembagaan penyuluhan agama?

Penelitian ini akan berguna bagi penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan agama dalam suatu sistem yang terpadu. Penelitian ini akan digambarkan partisipasi aktif semua aktor terutama dalam hal pendefinisian masalah, analisis situasi serta identifikasi tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam sistem penyuluhan agama.

Konsep Operasional

Makna terdalam penyuluhan sebagai sebuah gerakan transformasi masyarakat adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam semua tingkatannya agar mereka tahu,

mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, tujuan dari penyuluhan adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dari penyuluhan agama adalah untuk menciptakan masyarakat yang dapat menyelesaikan persoalannya sehari-hari dalam bidang keagamaan demi mencapai ketenangan batinnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan partisipasi semua pihak, yaitu semua *stakeholders* penyuluhan agama secara sinergis. Seiring sinergisme antar berbagai komponen penyuluhan agama tersebut, maka akan semakin baiklah proses penyuluhan agama yang secara langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu penyuluhan agama itu sendiri. Sinergisme inilah kemudian dikenal dengan sistem. Melalui sistem penyuluhan, akan terlibat berbagai komponen di dalamnya dalam mencapai tujuan. Sebagaimana kandungan dalam kata sistem yang terdiri atas empat pokok pikiran tentang ; kesatuan, bagian, berhubungan, teratur, sehingga keberadaan suatu sistem dapat dikenali melalui terstrukturnya kebersamaan dan ketergantungan antara fungsi-fungsi terkait dalam mencapai tujuan masing-masing dan tujuan bersama.⁶ Sistem penyuluhan juga bekerja dalam mensukseskan berbagai program. Oleh sebab itu, sistem penyuluhan ini begitu unik. Ia menyediakan ragam fungsi dari berbagai program pembangunan.⁷

Dinamisnya penyuluhan dengan bekerjanya sistem akan berdampak pada meningkatnya mutu. Hal ini seperti yang terjadi pada keberhasilan sistem agribisnis berkat saling ketergantungan berbagai komponennya.⁸ Pada bidang keagamaan, bekerjanya sistem

penyuluhan agama diharapkan dapat membuka jalan bagi terevitalisasinya perilaku beragama masyarakat yang akan semakin religius, bijak dan bahagia. Tujuan di akhir itu dalam beberapa penelitian, sebagaimana di Mali khususnya menggunakan sistem RAAKS terwujud berkat semakin kuatnya masyarakat setempat dalam basis organisasinya.⁹ Dalam rangka meneliti sistem penyuluhan agama inilah, masalah yang dieksplorasi adalah dinamika penyuluhan agama dalam membentuk masyarakat religius. Untuk itu akan digambarkan platform sistem penyuluhan agama yang memacu kemitraan strategis antar subsistemnya.

Tinjauan Pustaka

Penyuluhan agama sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Penyuluhan agama merupakan bagian dari konsep dakwah yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan *religious social engeneering*.¹⁰ Maka dari itu, penyuluhan agama dituntut untuk lebih berperan dalam membentuk pola perilaku keagamaan tertentu masyarakat sebagai syarat untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupannya menjadi lebih baik.

Untuk mendapatkan hasil penyuluhan agama yang baik, diperlukan berbagai upaya khususnya berkaitan dengan maksimalisasi setiap komponennya. Dengan demikian, keterhubungan satu komponen dengan lainnya akan semakin menambah hasil yang dicapai berupa tujuju tertentu sesuai yang diharapkan.

Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks.¹¹ Pendapat lain menyebutkan sistem sebagai suatu konglomerasi elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling mempengaruhi (kadang-kadang secara positif dan kadang-kadang secara negatif) dengan tujuan mencapai atau menciptakan sasaran tertentu yang dikehendaki oleh sistem yang bersangkutan. Sistem yang berfungsi dengan baik akan menghasilkan output yang baik pula, demikian juga sebaliknya, sehingga kualitas dan kuantitas dari output akan bergantung dari kualitas fungsi dari masing-masing komponen, sehingga jika salah satu komponen tidak ada atau tidak berfungsi maka sistem tidak akan berfungsi dengan baik.¹²

Penjelasan rincian sistem, dapat disebutkan sebagai berikut : 1) Memiliki tujuan, 2) Memiliki batas yang memisahkannya dari lingkungan, 3) Bersifat terbuka dengan berinteraksi dengan lingkungannya, 4) Terdiri dari subsistem yang biasa disebut bagian, unsur atau komponen, 5) Merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu dari setiap subsistemnya, 6) Saling hubungan dan ketergantungan baik di dalam sistem maupun antara sistem dengan lingkungannya, 7) Melakukan proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran, 8) Terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik, 9) Mampu mengatur diri secara otomatis.¹³ Komponen lainnya ada yang menambahkan kesatuan usaha atau holisme, yang mencerminkan suatu sifat dasar dari sistem di mana hasil

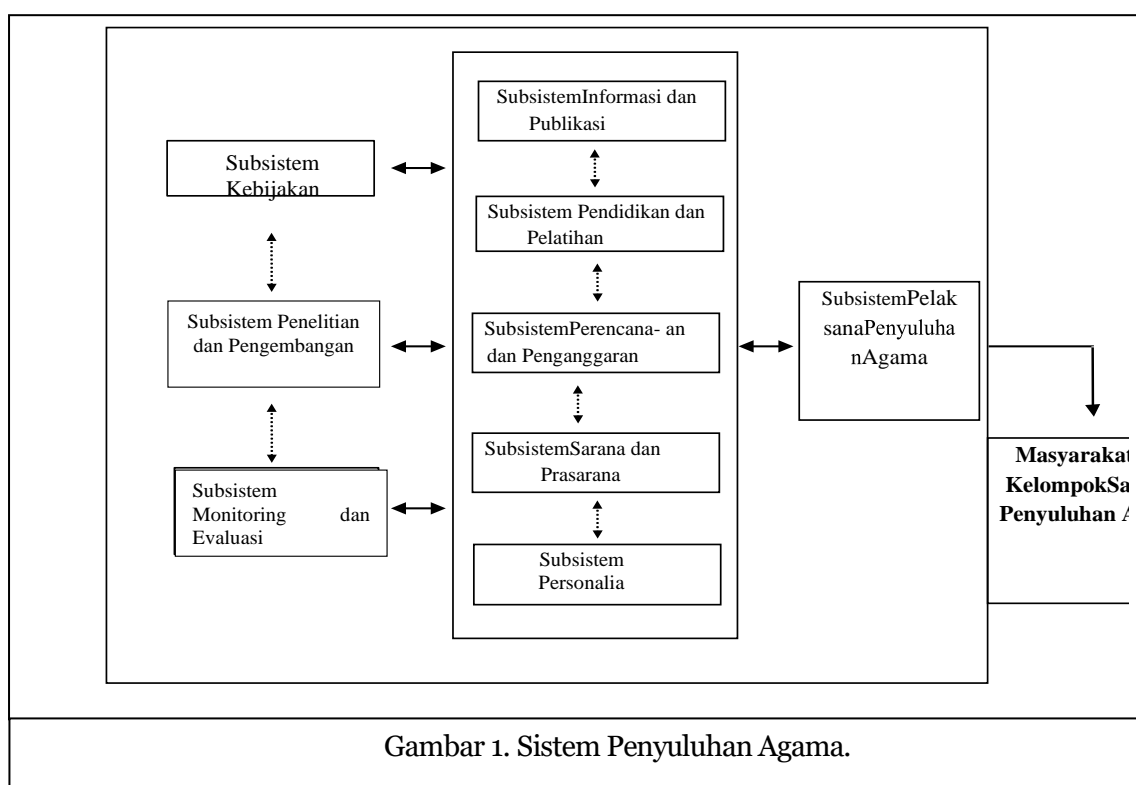
keseluruhan melebihi dari jumlah bagian-bagiannya atau sering disebut konsep sinergi.¹⁴

Telah banyak berbagai pendekatan sistem penyuluhan yang diperkenalkan. Terbaru merupakan pendekatan sistem penyuluhan RAAKS (*Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems*) yang dikembangkan oleh Engel, Salomon and Fernandez (1994) untuk menganalisis kelembagaan pertanian.¹⁵ Ciri utama metode RAAKS adalah pendekatan partisipatif yang fleksibel untuk mendefinisikan situasi, masalah dan menemukan upaya pemecahannya. Metode ini akan memberikan gambaran tentang partisipasi aktif semua aktor terutama dalam hal pendefinisian masalah, analisis situasi serta identifikasi tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam sistem penyuluhan agama. Modifikasi seputar analisis RAAKS untuk menjelaskan sistem pada berbagai kelembagaan penyuluhan terjadi pada sub-sektor perikanan yang telah sukses diterapkan dalam bentuk *Rapid Appraisal of Fishery Information Systems* (RAFIS) oleh Suradisastra, Blowfield dan Syafa'at (1995),¹⁶ analisis RAAKS untuk sub-sektor kesehatan telah dilakukan sebagaimana rilis artikel "*Opportunities for Health Promotion: The Knowledge and Information System of The Valencian Food Sector, Spain*" oleh Boonekamp, et. all (1996).¹⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan metode pendekatan interaktif *Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems* (RAAKS) yang dimodifikasi sesuai karakteristik sistem penyuluhan agama. Data dikumpulkan melalui interview terhadap key informan, diskusi dengan informan terpilih dan kajian analisis terhadap kapasitas sistem penyuluhan agama. Data dan informasi dihimpun dalam catatan harian dalam

medan penyuluhan yang dapat digunakan sebagai barometer sistem penyuluhan agama di perkotaan Indonesia dengan segala kelengkapan kelembagaan dan banyaknya tantangan. Pengamatan dilaksanakan dari akhir bulan Juni sampai bulan September 2020. Untuk menyimpulkan semua data, penulis menyusun kerangka analisis yang dibangun dari teori sistem, khususnya sistem penyuluhan agama. Berdasarkan



bentuk narasi deskriptif dan pernyataan garis besar. Sasaran penelitian ini adalah pengguna jasa penyuluhan agama, organisasi staf penyuluhan agama pada level kota Tangerang Selatan, penyuluh agama, perwakilan organisasi keagamaan di tingkat Kota Tangerang Selatan, serta *stakeholders* lain yang memahami atau berhubungan dengan penyuluhan agama.

Lokasi penelitian berada di Kota Tangerang Selatan, Banten. Penetapan lokasi ini disebabkan kompleksitas

data yang terkumpul dirumuskan sebagai hasil kajian yang pada gilirannya nanti akan diuji oleh para pakar, pemerhati dan pelaku penyuluhan agama melalui beberapa forum ilmiah. Baru setelah melampaui tahapan uji, simpulan dapat secara definitif disampaikan kepada khalayak dan pantas untuk diterapkan.

A. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Penyuluhan Agama Di Tangerang Selatan

Pendekatan sistem telah memberikan sejumlah data dan fakta dari sebuah identifikasi kebutuhan sehingga menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif. Sehingga kaitan antara faktor-faktor makin lama makin erat, aktifitas di salah satu sub sistemnya akan mempunyai pengaruh pada sub sistem lain. Hal tersebut mencerminkan kompleksitas dari lingkungan di mana sistem berada. Ketika sistem terjadi di organisasi seperti organisasi penyuluhan agama di Kota Tangerang Selatan, Banten, maka akan didapati beberapa manfaat potensial bagi para *stakeholders*nya.

Fungsi penyuluhan agama sebagaimana penyuluhan yang lain meliputi fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi penelitian, fungsi pendidikan dan pelatihan, fungsi informasi, dan fungsi penyuluhan agama itu sendiri. Fungsi-fungsi ini menjadi subsistem dalam Sistem Penyuluhan Agama. Bila ditambah dengan fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan, maka akan semakin lengkaplah sebuah sistem untuk bekerjanya suatu konversi input menjadi output.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa *stakeholders* penyuluhan agama, sistem penyuluhan agama terdiri atas beberapa level, yaitu ; level nasional, level provinsi dan level kota/kabupaten. Sistem Penyuluhan Agama seperti pada Gambar 1 khusus terimplementasi pada tingkat Kota Tangerang Selatan. Adapun hubungan antar jenjang sistem seperti digambarkan pada Gambar 2 menunjukkan hubungan koordinatif dan konsultatif antar Sistem Penyuluhan Agama Tingkat Nasional, Sistem Penyuluhan Agama Tingkat Provinsi dan Sistem Penyuluhan Agama Tingkat Kota Tangerang Selatan. Subsistem yang ada pada masing-masing Sistem Penyuluhan

Agama sama atau dengan beberapa penyusuaian, namun tugas dan fungsinya menyesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing sistem. Masing-masing sistem dalam hal ini diasumsikan otonom dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun tidak terlepas dengan sistem lainnya dalam koordinasi dan kesinambungan alur program yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Sistem Penyuluhan Agama Tingkat Kota Tangerang Selatan berada di bawah koordinasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang selatan. Tugas pokok dan fungsi Sistem Penyuluhan Agama Tingkat Kota Tangerang selatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan agama di tingkat kota yang sesuai arahan kebijakan dan program penyuluhan di tingkat provinsi dan nasional,
- b. Melaksanakan penyuluhan dan tata kerjapenyuluhannya,
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagimasyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan dengan berbagai mitra penyuluhanagama,
- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat;dan
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS dan penyuluh non PNSmelalui proses pembelajaran secaraberkelanjutan.

Berbeda dengan sistem lainnya (Sistem Penyuluhan Agama Tingkat Nasional dan Sistem Penyuluhan Agama

Tingkat Provinsi), Sistem Penyuluhan Agama Tingkat Kota Tangerang Selatan merupakan sistem yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan kelompok sasaran penyuluhan agama. Oleh karena itu, pada Sistem Penyuluhan Agama Tingkat Kota Tangerang Selatan terdapat Subsistem Pelaksana Penyuluhan Agama dan Subsistem Kelompok Sasaran Penyuluhan Agama.

2. Mekanisme Kerja Kelembagaan Penyuluhan Agama di Kota Tangerang Selatan

Mekanisme kerja kelembagaan penyuluhan agama kota/kabupaten diartikan sebagai keterkaitan semua unsur mulai dari input, sumberdaya manusia, proses kerja kelembagaan penyuluhan sampai kepada outputnya yang dapat dievaluasi capaian kinerjanya pada wilayah kota/kabupaten. Secara umum, mekanisme kerja kelembagaan penyuluhan agama kota/kabupaten dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1 yang mulai dari pelaksanaan program kerja yang ternyata sangat tergantung atau setidak-tidaknya mengacu pada program kerja atau kebijakan lembaga penyuluhan di atasnya.

Selain melaksanakan program kerja yang bersifat internal—melaksanakan program kerja dari lembaga vertikal di atasnya, kelembagaan penyuluhan agama kota/kabupaten juga melaksanakan program kerja yang bersifat eksternal—program kerja sinergis dari lembaga horizontal sebagai mitra kerja program lintas sektoral. Program kerja dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluhan tingkat Kota/Kabupaten yaitu Seksi PEN AIS.¹⁸ Dalam seksi ini, PAI dipimpin oleh seorang kepala Seksi PEN AIS yang memberikan petunjuk

pelaksanaan program tambahan sampai kepada pengkoordinasian pelaksanaan program rutin kepada PAI. Dalam mendukung terselenggaranya program rutin maupun tambahan, Seksi PEN AIS dibantu sejumlah staff pegawai administrasi yang melayani kebutuhan administrasi terkait pelaksanaan fungsi dan tugas para PAI ini. PAI melaksanakan berbagai tugas, di antaranya adalah : (1) Penyuluhan, (2) Bimbingan teknis, (3) Identifikasi potensi wilayah/objek binaan / aliran sesat, (4) Administrasi, (5) Pendukung kegiatan MTQ / Lintas sektoral, (6) Sinergi pembinaan (baik tugas rutin maupun lintas sektoral), dan (7) Pendukung kegiatan PHBI.

Dalam hal penyuluhan agama, PAI memberikan layanan penyuluhan tatap muka kepada kelompok binaannya baik kelompok binaan masyarakat umum maupun kelompok binaan khusus yang telah menjadi kelompok binaan tetapnya. Selanjutnya memberikan bimbingan teknis kepada personal dan organisasional. Secara personal bimbingan teknis berkaitan dengan materi penyuluhan agama seperti pelaksanaan zakat atau materi penyuluhan yang sifatnya teknis. Secara organisasional bimbingan teknis diberikan pada kelompok seperti Majelis Ta'lim, Taman Pendidikan Al Qur'an, Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid maupun kelompok atau lembaga lain yang berkaitan dengan fungsi tugas PAI.

Berikutnya identifikasi potensi wilayah atau objek binaan. Di sini, PAI menyusun laporan kondisi terkini dari hasil survey dan observasi potensi wilayah kerja masing-masing tentang berbagai kondisi sosial, budaya, kehidupan keagamaan berikut sarana lingkup keagamaannya, maupun kondisi terakhir

lembaga binaan yang PAI bina untuk diolah sebagaimana mestinya. Laporan itu dibuat sebagai database potensi dakwah.

Terkait identifikasi aliran dan faham keagamaan, PAI melakukan observasi bersama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kota/Kabupaten untuk selanjutnya menyusun laporan kemudian disampaikan pada Seksi PENAIS. Demikian pula halnya dengan antisipasi permasalahan pendirian rumah ibadah, PAI melakukan kerjasama dengan FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) yang hasilnya dilaporkan kepada Kasie PENAIS.

PAI juga harus melengkapi kinerjanya dengan melaksanakan administrasi baik sebagai alat evaluasi pelaksanaan kinerjanya maupun untuk keperluan kenaikan pangkatnya. Pendukung kegiatan MTQ / Lintas sektoral dilakukan PAI dilaksanakan secara rutin baik untuk tingkat kecamatan maupun tingkat Kota/Kabupaten. Kegiatan tersebut sejatinya diinisiasi instansi lintas sektoral (seperti Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten) yang dalam pelaksanaannya didukung oleh PAI. Beberapa kegiatan lintas sektoral yang didukung PAI adalah kegiatan penilaian desa sehat, penilaian sekolah bersih teladan, kegiatan Dharma Wanita dan kegiatan PHBI.

Sebagai penyedia layanan jasa di masyarakat, PAI dalam melakukan pembinaan (baik tugas rutin maupun lintas sektoral) tidak terlepas dari melakukan sinergi dengan berbagai *stakeholders*. Sinergi pembinaan dilakukan PAI bersama- sama dengan

perseorangan, instansi dan kelembagaan agama terkait baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sinergi pembinaan kemasjid dilakukan bersama dengan Seksi Urusan Agama Islam, pembinaan Taman Pendidikan Al Qur'an dilakukan bersama dengan Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, dan sinergi pembinaan keluarga sakinah dan pangan halal bersama dengan Kantor Urusan Agama.

3. Penyuluhan Agama Di Kota Tangerang Selatan Dalam Perspektif RAAKS

Peran serta penyuluh agama semakin dituntut untuk berkiprah lebih banyak dalam menyelaraskan pemahaman keagamaan masyarakat yang toleran dan humanis. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, peran penyuluh juga sangat penting diselaraskan dengan tujuan pembangunan Nasional. Pembangunan di Indonesia tidak semata-mata membangun manusia dari sisi jasmani semata, akan tetapi juga membangun rohaninya secara bersama-sama. Penyuluhan agama bertujuan untuk membuat perubahan terencana menuju keadaan masyarakat yang memiliki kesadaran beragama yang toleran sehingga akan berakibat pada meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Peran penyuluh ini tampaknya sangat penting, posisi pentingnya para penyuluh untuk mendampingi seluruh kelompok sosial dalam seluruh strata yang berbeda beda, agar mereka tetap konsisten dalam mengamalkan dan menjaga implementasi norma norma agama dalam seluruh aktifitas profesi dan sosial. Penyuluh memiliki peran yang

amat penting untuk mengajak seluruh elemen masyarakat terutama dalam memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam yang benar bahwa ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin.

Penyuluh agama berfungsi agama menjadikan masyarakat muslim Indonesia berwawasan keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UU 45 yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, perlu peningkatan kompetensi dosen BPI agar menjadi penyuluh yang profesional. PAI yang profesional adalah seorang penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kerja untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan agama.

Eksistensi penyuluh agama sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat. Dengan menggunakan bahasa agama keberadaan penyuluh agama memiliki fungsi sebagai inspirator, motivator, stabilisator, dan dinamisator pembangunan di tengah masyarakat. Dalam pembangunan peran penyuluh agama tidak hanya pada dimensi fisik-material semata, melainkan juga pembangunan mental-spiritual manusianya. Di sinilah pentingnya peran dan fungsi penyuluh agama untuk membangun mental dan spiritual masyarakat Indonesia yang agamis sehingga agama bukan sebatas formalitas dan identitas.

Penyuluh Agama secara istilah mulai diperkenalkan dengan adanya yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama pada tahun 1985. Istilah yang umum dipakai sebelumnya di lingkungan kementerian Agama ialah Guru Agama Honorer (GAH)

yang kemudian beralih menjadi Penyuluh Agama. Hal ini Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi peraturan di atas, Presiden mengeluarkan PP nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan. Sementara itu menurut keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 54/KEP/MK.WASPAN-/9/1999 keberadaan penyuluh Agama mulai diperjelas status jabatan fungsional dan penghitungan angka kreditnya.

Kemudian Kementerian Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan keputusan nomor 574 Tahun 1999 dan nomor 178 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut dari pengaturan tata teknis pengangkatan, penilaian, penetapan angka kredit, kenaikan jabatan, sanksi, pengangkatan dan pemberhentian penyuluh agama.

Berdasarkan peraturan perundang undangan di atas pengertian penyuluh agama dapat diartikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa

bimbingan keagamaan adalah aktivitas memberikan penyuluhan oleh penyuluh agama yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Dalam pengertian yang lain aktivitas kepenyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama bisa dimaknai dalam bentuk penyampaian dan penerangan ajaran agama kepada umat.

Namun demikian, para praktiknya aktivitas penyuluhan agama tidak hanya semata mata hanya penerangan ataupun penyuluhan tetapi bisa juga bersifat komunikasi timbal balik, antara penyuluh agama dengan masyarakat tetapi bisa sebaliknya wadah konsultasi agama bagi masyarakat terhadap penyuluh agama persoalan-persoalan yang muncul yang di tengah tengah umat Islam. Adapun pembangunan dengan bahasa agama berarti kegiatan yang dilakukan untuk menyukseskan program-program pembangunan yang berskala nasional maupun daerah.

Ada dua jenis penyuluh agama Islam yaitu penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non PNS. Penyuluh agama Islam non PNS adalah penyuluh agama Islam honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

Pengertian tentang definisi penyuluhan Agama memang tidak semua penyuluh agama memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Kalaupun sudah ada peraturan perundang undangan yang sudah mengatur tugas, fungsi, dan tanggung jawab penyuluh

agama, akan tetapi belum tentu pemahaman praktisi penyuluh agama di lapangan memiliki pemahaman yang sama. Penyuluhan Agama Tingkat Kota Tangerang Selatan berada di bawah koordinasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Terkait dengan masalah definisi diri para penyuluh agama menjelaskan yang dimaksud dengan penyuluh agama ialah semua kegiatan yang bergerak di bidang dakwah dapat dikatakan sebagai penyuluh agama. Dan penyuluhan agama diperlukan bagi seluruh masyarakat yang beragama Islam di manapun mereka berada. Dan oleh karena itu, penyuluhan agama merupakan tanggung jawab semua umat Islam.

Berdasarkan pemahaman para penyuluh yang disebut dengan penyuluh agama pada hakekatnya ialah setiap pribadi muslim sebagaimana diterangkan dalam Quran surat 16 ayat 125. Namun karena tidak semua orang muslim mampu untuk menyampaikan tentang sebuah risalah dakwah, mempunyai pengetahuan diniyah. Maka dibebankanlah kepada ulama-ulama dan para asatidz serta lembaga- lembaga pendidikan madrasah dan pesantren yang berada di kota Tangerang Selatan ini. Mereka inilah yang mempunyai beban untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya agama. Jadi merak yang merasa berada pada posisi tersebut harus berkewajiban menyampaikannya kepada masyarakat, khususnya yang sudah beragama Islam. Karena sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pemahaman masyarakat yang berada di kampung kampung tentang agama terkadang masih mengikuti apa kata-kata nenek moyang dulunya tidak berdasarkan dengan dalil syaria yang benar.

Bimas cukup sadar bahwa bersinergi dalam masalah kepenyuluhan ini sangat penting, karena banyaknya persolan-persoalan ummat terutama mengenai perbedaan aliran-aliran dan beragam praktek keagamaan. Islam secara praktek di lapangan cukup sekali, dan ini seringkali menimbulkan kerancuan dan di tengah masyarakat, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah, Persis dan lain sebagainya. Meskipun masyarakat sudah memahami bahwa setelah Muhammad dengan Al-quran sebagai yang terakhir, akan tetapi masih ada saja arang mengaku-ngaku sebagai Nabi dan menerima wahyu. Ada lagi yang menambahkan kalimattauhid dengan berbagai penafsirannya. Menurut Bimas Islam, hal hal ini perlu diluruskan.

4. Analisis Sistem Penyuluhan Agama

a. Impact Analysis

Analisis dampak kepenyuluhan adalah kemampuan menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan kelayan penyuluhan, melaksanakan bimbingan atau penyuluhan dengan melibatkan kelayan penyuluhan dalam hal perencanaan maupun evaluasinya, menyediakan waktu khusus untuk layanan konsultasi baik perorangan maupun kelompok dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal kepada kelompok binaannya. Pada kondisi melakukan penyuluhan secara bergiliran, PAI banyak memberikan materi yang berbeda dengan narasumber lainnya dan seringkali materi pembangunan menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan menggunakan pendekatan berbahasa agama.

b. Communication Analysis

Kompetensi kemampuan komunikasi adalah kemampuan dalam menyajikan materi dengan intonasi yang jelas, menarik perhatian, bahasa yang mudah dipahamidan menggunakan humor, mengaktifkan tanya jawab atau diskusi, dan menyesuaikan banyaknya materi penyuluhan dengan kebutuhan kelayan penyuluhan. Berbagai konsep agama yang abstrak cenderung telah disampaikan lebih bersifat operasional atau didekati dengan pendekatan penyelesaian permasalahan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang kondisi keseharian yang tentunya sangat menarik perhatian kelayanpenyuluhan.

Selain itu sebagai penyuluh agama juga memiliki kemampuan menjalin komunikasi dengan sesame penyuluh agama. Lembaga yang berada di dalam kemenag seperti Pokjaluh, FKPAI, Kasie dan KUA senantiasa berada dalam satu Bahasa yang sama Namun demikian komunikasi antar lembaga tidak selalu dapat dijalin dengan baik, ada saja faktor faktor penghambat penyebab muskomunikasi. Menurut salah seorang informan, miskomunikasi dapat disebabkan karena adanya penyebaran isu bohong alias hoaks di media sosial.

c. Understanding the Social Organization

Kompetensi memahami kelompok social kegamaan meliputi kemampuan menjembatani berbagai kepentingan dan permasalahan antar anggota kelompok organisasi binaan, memberikan pembinaan teknis, membantu menghasilkan kerjasama kelompok binaan yang lebih baik, memberikan solusi terhadap permasalahan kelompok binaan dan memberikan usulan kegiatan manakala kelompok tidak memiliki kegiatan.

Diakui, memang secara real di lapangan kemampuan komunikasi penyuluh agama dalam memahami organisasi keagamaan dirasakan masih kurang. Seringkali jika terdapat permasalahan yang terkait dengan penyimpangan paham keagamaan yang melibatkan organisasi keagamaan tertentu untuk sementara ini lebih banyak melibatkan MUI Kota, dan aparat kepolisian.

d. Stakeholders Analysis

Untuk dapat mencapai peran penyuluhan agama, maka kelembagaan penyuluhan agama perlu lebih profesional dan menyadari sebuah prinsip “Sebelum lelah karena bekerja sendirian, ada baiknya apabila bekerja bersama”. Luasnya medan dakwah dan panjangnya waktu berjalan, mengharuskan semua *stakeholders* untuk saling mengikatkan diri dalam satu barisan yang kokoh dan teratur dengan saling melengkapi satu sama lain. Hal mana yang tidak bisa dilakukan sendirian sebagaimana hasil penyuluhan agama selama ini, akan dapat dilakukan secara bersama-sama untuk kemaslahatan bersama.

Maka oleh karena itu, pelibatan stakeholder dalam penyuluhan agama melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Biasanya tergantung pada kebutuhan dan program apa yang ingin dikembangkan. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, dalam isu meningkatkan paham moderasi Beragama misalnya semua unsur stakeholder dilibatkan dalam isu-isu ini seperti penyuluh PNS, penyuluh honorer, Pokjalah, ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Taklim. Para mubtaliq, Dll. Selain itu, dalam mempersiapkan tenaga

penyuluh yang handal, tiga lembaga yang dilibatkan ialah lembaga perguruan Tinggi, kementerian Agama, dan Balai Diklat.

e. Task Analysis

Kemampuan memahami tugas dan hasil yang harus dicapai oleh kelayan penyuluhan, mendorong kelayan penyuluhan untuk mengembangkan kemampuannya sehingga berubah ke arah yang lebih baik, memastikan kelayan penyuluhan mendapat informasi yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan, mampu menciptakan suasana keterbukaan yang membuat kelayan penyuluhan menyadari adanya masalah dan kekurangan dalam situasi di sekitarnya, mampu membantu kelayan penyuluhan untuk menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya belajar, serta mampu mengembangkan keterampilan kelayan dalam membuat kritik yang membangun.

Kompetensi mengembangkan tugas penyuluhan menyangkut kemampuan menyusun berbagai juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) kepenyuluhan agama, mengembangkan metode bimbingan, membuat materi penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta penyuluhan, menyusun konsep kepenyuluhan, dan membuat media penyuluhan.

Kompetensi PAI menurut persepsinya sendiri yang terlemah terletak pada kompetensi mengembangkan profesionalisme dan kompetensi mengembangkan penyuluhan. Dengan demikian, PAI menilai bahwa kompetensi mereka dalam mengembangkan keilmuan yang masih tertinggal di antaranya dalam hal melaksanakan berbagai kegiatan karya

tulis bidang penyuluhan agama berupa buku, makalah atau artikel populer, ulasan ilmiah dalam bentuk buku atau makalah, membuat terjemahan dari buku asing dan meresensi buku, melaksanakan penelitian kepenyuluhan, dan membimbing PAI yang berada pada jenjang di bawahnya. Kompetensi PAI yang masih perlu perbaikan dilihat dari sisi pengembangan kepenyuluhan agama adalah dalam menyusun berbagai petunjuk juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) kepenyuluhan agama, mengembangkan metode bimbingan, materi penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelayan penyuluhan, menyusun konsep kepenyuluhan, dan membuat media penyuluhan.

Kelayan penyuluhan menilai bahwa kompetensi terlemah dari PAI terletak pada kompetensi menyelenggarakan penyuluhan dan mengembangkan kelompok. Ini berarti bahwa PAI menurut kelayan penyuluhan belum memenuhi kebutuhan kelayan penyuluhan dalam hal menyelenggarakan penyuluhan berupa materi yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kelayan penyuluhan. PAI dinilai kurang atau bahkan tidak pernah melibatkan kelayan penyuluhan dalam hal perencanaan maupun evaluasi, kurangnya kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang disampaikan pada sesi tanya jawab atau konsultasi. Kelayan penyuluhan juga menilai bahwa pembinaan PAI terhadap kelompok binaannya masih sangat jauh dari harapan terutama dalam mendinamiskan kelompok binaan, memperbaiki administrasi kelompok binaan dan menjembatani berbagai kepentingan dan permasalahan kelompokbinaan.

Perencanaan Peningkatan Kapasitas Sistem Penyuluhan Agama

Pengamatan partisipatif dengan mengadopsi metode *Rapid Analysis of Agricultural Knowledge Systems (RAAKS)* secara luwes dapat digunakan untuk mendefinisikan masalah, melakukan analisis pada komponen-komponen sistem, dan menemukan upaya atau perencanaan peningkatan kapasitas sistem dengan melibatkan para aktor sendiri. Sebagaimana halnya sebuah sistem, penyuluhan agama juga memiliki lembaga-lembaga (*stakeholders*) yang memiliki potensi positif untuk dikembangkan. Sebagai titik awal untuk bisa meningkatkan kapasitas sistem penyuluhan agama, diperlukan tujuan bersama yang diketahui dan disepakati oleh para *stakeholders* tersebut.

Berikut ini akan dipaparkan perencanaan peningkatan kapasitas sistem penyuluhan agama dalam tiga hal yaitu *knowledge management analysis*, *actor potential analysis* dan *strategic commitment to action plan berdasarkan temuan penelitian*.

a. Knowledge Management Analysis

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan faktor penting yang berdampak pada kapasitas dan performa sistem penyuluhan agama. Secara umum analisis manajemen pengetahuan ini mencari tahu apakah lembaga-lembaga (*stakeholders*) penyuluhan agama memahami dan memiliki langkah-langkah sistematis dalam mengelola pengetahuan dan berbagai informasi dari lembaganya untuk meningkatkan sistem penyuluhan agama. Berdasarkan temuan

wawancara, subsistem penyuluhan agama sudah memiliki pengetahuan akan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sistem. Tentunya pengetahuan tersebut sesuai dengan fungsi penyuluhan yang menjadi fokus masing-masing lembaga.

Lembaga pertama yang akan dipaparkan adalah MUI sebagai lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu"ama, dan cendikiawan Islam. MUI bertugas membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam. Di tingkat Kota, MUI membuat membuat regulasi berdasarkan fatwa MUI Pusat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Selain terkait dengan subsistem kebijakan, MUI menunjang sistem penyuluhan agama di Tangsel sebagai subsistem yang berfokus pada penelitian dan pengembangan dengan didukung oleh ulama, zu"ama, dan cendikiawan Islam sesuai kepakaran masing-masing terkait masalah umat.

Lembaga lain yang merupakan subsistem penelitian dan pengembangan dalam sistem penyuluhan agama adalah universitas, dalam hal ini Program Studi yang membuka pendidikan di bidang penyuluhan agama. Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang ada di PTKIN membantu mempersiapkan calon penyuluh agama sebagai kunci atau subsistem pelaksana penyuluhan agama di masa depan. Adapun langkah-langkah sistematis dalam mengelola pengetahuan dan berbagai informasi dari lembaga Perguruan Tinggi untuk meningkatkan sistem penyuluhan agama adalah dengan mengembangkan keilmuan BPI lewat berbagai literatur dan penelitian.

Untuk subsistem Kebijakan, lembaga yang memegang peran adalah

pembuat keputusan bidang keagamaan di tingkat kota yaitu seksi Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) di kantor Kementerian Agama kota Tangerang Selatan. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi dari Seksi Bimas Islam yaitu menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kepenyuluhan dan Penerangan agama Islam dan Zakat Wakaf serta Musabaqoh Tilawatil Qur`an.

Menurut Kasie Bimas Islam, agar sistem penyuluhan agama dapat bekerja dengan optimal, seluruh unsur terutama di kementerian agama melaksanakan amanat tugas secara vertikal dari pusat ke tingkat di bawahnya. Karenanya, komunikasi dan sinergi dari Bimas Islam tingkat Kota perlu dipastikan berjalan dengan baik pada penyuluh-penyuluh yang ada di Kelurahan, Desa, dan Kecamatan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen pada negara agar bisa mencegah kegaduhan terkait masalah umat.

Fungsi pelatihan dalam sistem penyuluhan agama dijalankan oleh subsistem Pendidikan dan Pelatihan yaitu lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Lembaga Pusdiklat Keagamaan berperan menyiapkan calon penyuluh agama menjadi penyuluh agama yang profesional, memiliki integritas, tanggung jawab, dan memiliki keteladanan.

Selain menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan, Widyaiswara yang mengetahui kondisi nyata para pelaksana penyuluhan di lapangan juga memberi masukan pada subsistem perencanaan dan anggaran. Menurut Abdul Jalil, para penyuluh agama yang

terdiri dari para sarjana, master bahkan doktor yang idealis sehingga sangat potensial mengatasi masalah umat. Sayangnya ketiadaan anggaran membatasi mereka dalam melakukan pembinaan pada masyarakat.

Dalam memberikan pelatihan, Pusdiklat Keagamaan tidak hanya memberikan materi untuk penguatan substantif dan kompetensi melainkan juga materi mengenai bagaimana koordinasi dengan pihak internal para penyuluh (Kasi Bimas Islam di Kementerian Agama kota atau Kabupaten, kepala bidang PENASIS, direktur PENASIS, Dirjen Bimas Islam yang sampai ke pusat) dan koordinasi dengan lembaga pemerintah tingkat kota bidang Kesra (lintassektoral).

Sejalan dengan hal di atas, Kepala Bagian Kesra Kota Tangsel juga mengatakan bahwa di Tangerang Selatan terdapat penyuluh-penyuluh sampai di tingkat kelurahan yang menyampaikan 8 fungsi keluarga termasuk fungsi agama. Terkait dengan lembaga-lembaga, lembaga pemerintah sering berkoordinasi terkait dengan penyuluhan dengan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi untuk penguatan terhadap para penyuluh agama di wilayah Kota Tangerang Selatan. Apabila ditarik lebih jauh, pemerintah kota menjembatani koordinasi pihak-pihak yang terdapat dalam sistem penyuluhan agama agar bersama-sama dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai visi kota Tangsel.

Berdasarkan data dari KUA, PAI PNS (Pokjaluh) dan PAI Non- PNS (FKPAI) dapat disimpulkan bahwa subsistem pelaksana secara operasional bekerja sama dengan berbagai subsistem lainnya. Analisis aktor potensial atau

pihak-pihak yang memiliki peluang untuk saling bekerja sama akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

Dalam melakukan tugas penyuluhan yang berfokus pada delapan bidang garapan, penyuluhan agama akan melibatkan organisasi keagamaan, masyarakat dan dakwah tingkat kota. Pada penelitian ini, lembaga yang diteliti adalah sektor wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tingkat Kota Tangsel; sektor zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Kota Tangsel dan sektor kerukunan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat KotaTangsel.

b. Actor Potential Analysis

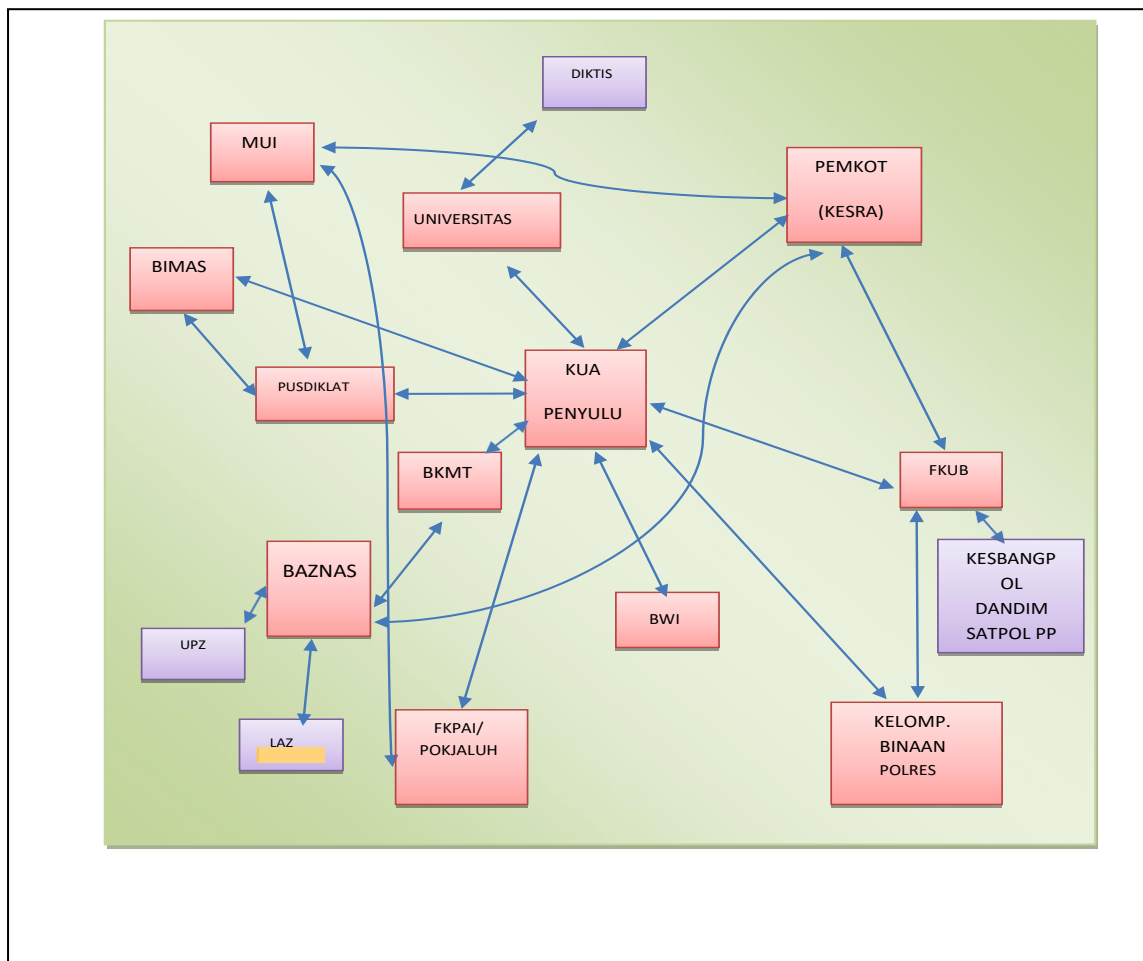
Setelah melakukan analisis terhadap manajemen pengetahuan yang dibangun oleh semua aktor (individu, organisasi, dan jaringan) yang terlibat dalam sistem penyuluhan agama, RAAKS selanjutnya dikembangkan sebagai metode untuk mengidentifikasi aktor yang potensial untuk saling bekerja samadalam meningkatkan sistem penyuluhan agama. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti, lembaga-lembaga yang merupakan subsistem dari penyuluhan agama memiliki ketergantungan satu sama lain dan memiliki peluang untuk saling bekerja sama.

MUI dengan Pusdiklat Keagamaan; MUI dengan Pemerintah Kota; MUI dengan FKPAI/ POKJALUH. MUI sebagai pusat berkumpulnya para ulama dari berbagai macam latar belakang tentu menjadi aktor potensial bagi beberapa lembaga lainnya dalam sistem penyuluhan agama. Utamanya, karena MUI tingkat kota merupakan pembuat regulasi di tingkat kota, berdasarkan

fatwa MUI pusat yang diterjemahkan dengan bahasa Tangerang Selatan. Pusdiklat keagamaan menjalin kerja sama dengan MUI dalam hal penyelenggaraan Diklat misalnya terkait produk halal, cara penyembelihan dan lainnya yang membutuhkan kepakaran dari ulama.

kesejahteraan hidup masyarakat terutama dalam beragama dan mendukung perwujudan motto Tangsel sebagai kota yang religius.

KUA/ Penyuluh dengan Pemkot;
KUA/ Penyuluh dengan Universitas;
KUA/ Penyuluh dengan Pusdiklat; KUA/



Gambar 2:
Hubungan Antar Subsistem Penyuluhan Agama

Sinergi MUI dengan organisasi penyuluhan FKPAI dan POKJALUH juga tak bisa dipungkiri karena para penyuluh dalam pelaksanaan tugas operasional akan memegang fatwa dan masukan dari ulama. Sedangkan dengan Pemkot, sinergi terjadi karena hadirnya MUI di tingkat kota adalah untuk mendukung

Penyuluh dengan BKMT; KUA/ Penyuluh dengan FKPAI dan Pokjaluh; KUA/ Penyuluh dengan BWI; KUA/ Penyuluh dengan Polres. KUA dan Penyuluh sebagai subsistem penyelenggara penyuluhan tentu memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti disebutkan di atas. Dalam penyuluhan agama,

koordinasi dengan lintas sectoral yaitu pihak eksternal di suatu wilayah baik kecamatan misalnya Polsek dan danramil, maupun biro keagamaan ada kabag agama di tingkat Kota tentu diperlukan.

Dengan Polres, kerja sama yang dilakukan salah satunya ketika penyuluh agama dilibatkan untuk memberikan siraman rohani dan bimbingan agama baik pada anggota Polres maupun tahanan Polres. Penyuluh agama sebagaimana tokoh agama di wilayah Tangerang Selatan bersinergi dengan Polri untuk bersama sama menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kerjasama dengan pihak universitas khususnya Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dilakukan terkait praktikum mahasiswa yang salah satunya dilakukan di KUA dengan melibatkan Penyuluh Agama PNS/ Non-PNS sebagai dosen pamong. Sedangkan, sinergi Pusdiklat dengan KUA dan penyuluh agama dilakukan lewat pelatihan-pelatihan dimana Pusdiklat/ Widyaiswara menjadi pihak pertama dan KUA/ Penyuluh menjadi pihak kedua. Selanjutnya, Penyuluh Wakaf pada BWI juga bermitra dengan KUA. Meskipun BWI merupakan pelaksana undang-undang wakaf, proses yang mengiringinya ada di KUA.

BIMAS dengan Pusdiklat; BIMAS dengan KUA/ Penyuluh. Dalam menyelenggarakan pelatihan bagi penyuluh, koordinasi dilakukan Pusdiklat dengan BIMAS karena penyuluh agama ada di bawah Bimas Islam secara kelembagaan. Pusdiklat juga pernah bekerja sama dengan Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Hindu dalam pelatihan calon penyuluh agama.

- a. FKUB dengan Pemerintah Kota; FKUB dengan Polres. FKUB

merupakan lembaga yang bersifat mandatori atau ormas yang terkait erat dengan pemerintah karena itu dalam kerjanya akan selalu bersinergi dengan pemerintah kota, kemenag dan kesbangpol. Selain itu, FKUB juga perlu bersinergi dengan Dandim, Polres, Kajari, Kadisdukcapil, KasatpolPP agar dapat bekerja sesuai jalur.

- b. BAZNAS dengan BKMT; BAZNAS dengan Pemkot. Meskipun BAZNAS Kota Tangerang Selatan independen, tetapi ada perencanaan ke depan untuk bersinergi dengan pemkot. BAZNAS tidak terlepas dari pemerintahan kota, karena Pemkot adalah pengawas dan pembina langsung dari BAZNAS tersebut. Sedangkan sinergi antara BAZNAS dengan BKMT, LAZ, dan UPZ perlu dilakukan karena kedua lembaga tersebut sama-sama berfokus pada pemberdayaan umat. Hubungan antar subsistem penyuluhan agama yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan memiliki peluang untuk saling bekerja sama dapat dilihat pada gambar 2.

Penutup

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Sistem penyuluhan agama terdiri atas subkomponen sistem penyuluhan agama yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesadaran beragama masyarakat. Subsistem tersebut terdiri atas subsistem kebijakan; subsistem penelitian dan pengembangan; subsistem monitoring dan evaluasi; subsistem informasi dan

publikasi; subsistem pendidikan dan pelatihan; subsistem perencanaan dan anggaran; subsistem sarana dan prasarana; subsistem personalia; serta subsistem pelaksana penyuluhan agama.

Penelitian ini melalui pendekatan partisipatif telah memulai upaya untuk merancang sistem penyuluhan agama yang dapat memperkuat peran penyuluhan agama di masyarakat dan kelompok sasaran. Adapun kajian mendalam terkait sistem dan upaya peningkatan kapasitas sistem penyuluhan agama perludilanjutkan.

Hubungan antar subsistem penyuluhan agama yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan memiliki peluang untuk saling bekerja sama dapat meningkatkan sistem penyuluhan agama. Adapun analisis mengenai kekuatan dan kekurangan individual maupun kelompok dalam subsistem jasa penyuluhan dapat salingmelengkapi.

Mengacu pada poin-poin di atas, dipandang perlu untuk merumuskan kembali standar kompetensi PAI yang selama ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 dan Nomor 178 Tahun 1999 (sudah 14 tahun sampai tahun 2013 ini) ke dalam situasi kekinian yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari rumusan itu kemudian akan dapat dipetakan kompetensi yang lebih sesuai dengan situasi kekinian dan sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa penyuluhan agama.

Setelah itu, baru kemudian akan mengarah pada penyusunan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Sektor Penyuluhan Agama agar menjadi setara dan maju

sebagaimana penyuluhan pembangunan yang lainnya seperti penyuluhan pertanian, penyuluhan kehutanan dan penyuluhan perikanan yang sudah lebih dahulu menata sistem penyuluhan berorientasi masa depan.

Rekomendasi

Diperlukan suatu wadah yang memayungi Jabatan Fungsional Rumpun Penyuluh, sehingga nantinya diharapkan memiliki standard tunggal dan terukur. Maka oleh karena diperlukan pengkajian dan analisis kebutuhan serta kebijakan publik terhadap penyuluh agama. Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kebutuhan jumlah penyuluh agama yang diperlukan secara riil dengan berdasarkan pada akuntabilitas kinerja dan kontribusinya pada kehidupan keagamaan di Kota Tangerang Selatan.

Dibutuhkan „ketetapan“ tugas dan fungsi serta tanggungjawab penyuluh agama secara menyeluruh berdasarkan pengkajian yang mendalam serta akurat. Bagaimanapun juga, penyuluh agama merupakan kepanjangan pemerintah, sehingga fungsinya bukan sekedar memberikan ceramah- ceramah atau pembinaan rohani umat, tetapi menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan program-program keagamaan yang selaras dengan kebijakan kebijakan pemerintah.

Catatan:

- ¹ Umar, Nasaruddin. 2008. “Mempertajam Visi Bimas Islam : Kalau Bukan Sekarang, Kapan ?, Kalau Bukan Kita, Siapa ?”, *Jurnal Bimas*

- Islam Departemen Agama Republik Indonesia Vol. 1, No. 1.* Jakarta
- ² Amanah. "Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia". *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 3, No. 1. Maret 2007. Hal. 63
 - ³ Wang, Sun Ling. "Cooperative Extension System : Trends and Economic Impact on U.S Agriculture". *Choices : The Magazine of Food, Farm and Resource Issues*. 1st Quarter. 2014. Vol. 29, (1). P. 4
 - ⁴ Davis, Kristin E. "Agriculture and Climate Change : An Agenda for Negotiation in Copenhagen (The Important Role of Extension Susters)". Foks 16. Brief 11. May 2009. International Food Policy Research Institute. Washington DC. P. 1
 - ⁵ Slamet, Margono. 2003. *Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Sudrajat, A dan Yustina, I. Bogor : IPB Press
 - ⁶ Mardikanto, Totok, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press; Marimin. 2004. *Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta : Grasindo. Hal. 1
 - ⁷ Wang, Sun Ling. *Loc. Cit.*
 - ⁸ Suparta, Nyoman. 2001. *Perilaku Agribisnis dan Kebutuhan Penyuluh Peternak Ayam Ras Pedaging*. [Disertasi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor
 - ⁹ Hulsebosch, Joitske. 2001. "The Use of RAAKS for Strengthening community based Organisations in Mali". *Development in Practice*. Vol. 11, Issue. 5, 2001. P. 622
 - ¹⁰ HM. Arifin dalam Romly, AM. 2003. *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata
 - ¹¹ Marimin. 2004. *Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta : Grasindo. Hal. 1
 - ¹² Winardi, J. 2005. *Pemikiran Sistemik dalam Bidang Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hal. 135
 - ¹³ Amirin, Tatang M. 2010. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 21-22
 - ¹⁴ Marimin. *Op. Cit.*, hal. 2; Winardi. *Op. Cit.*, Hal. 138
 - ¹⁵ Engel, Paul G.H., Monique L. Salomon and Maria E. Fernandez. 1994. *RAAKS: A Participatory Methodology for Improving Performance in Extension*. WAU/CTA/IAC, Wageningen.
 - ¹⁶ Suradisastra, Kedi, Mick Blowfield dan Nizwar Syafa'at. 1995. "Pengkajian Sosial Antropologi Perikanan Melalui Rapid Appraisal of Fishery Information Systems (RAFIS)". Kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Natural resource Institute dan Marine Resource Evaluation and Planning Project
 - ¹⁷ Boonekamp, GMM; Gutierrez-Sigler, MD; Colomer, C and Vaandrager, HW 1996. "Opportunities For Health Promotion: The Knowledge And Information System Of The Valencian Food Sector, Spain". *Health Promotion International Journal*, Vol. 11, No. 4, Great Britain
 - ¹⁸ Nomenklatur seksi yang mewadahi penyuluh agama di tiap kota/kabupaten berbeda. Ada yang mengambil bentuk Seksi Bimas Islam, ada juga yang bernama Seksi Bimbingan Syariah.

Daftar Pustaka

- Amanah. "Makna Penyuluhan dan Trnasformasi Perilaku Manusia". *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 3, No. 1. Maret 2007. H. 63-67
- Amirin, Tatang M. 2010. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Boonekamp, GMM; Gutierrez-Sigler, MD; Colomer, C and Vaandrager, HW 1996. "Opportunities For Health Promotion: The Knowledge And Information System Of The Valencian Food Sector, Spain". *Health Promotion International Journal*, Vol. 11 No. 4, Great Britain.
- Davis, Kristin E. *Agriculture and Climate Change : An Agenda for Negotiation in Copenhagen (The Important Role of Extension Sustems)*. Foks 16. Brief 11. May 2009. International Food Policy Research Institute. Washington DC. P. 1-2
- Engel, Paul G.H., Monique L. Salomon and Maria E. Fernandez.1994. *RAAKS: A Participatory Methodology for Improving Performance in Extension*. WAU/CTA/IAC, Wageningen.
- Hulsebosch, Joitske. 2001. *The Use of RAAKS for Strengthening community based Organisations in Mali. Development in Practice*. Vol. 11, Issue. 5, 2001. P. 622-632
- Mardikanto, Totok, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press; Marimin. 2004. *Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta : Grasindo
- Marimin. 2004. *Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta : Grasindo
- Romly, AM. 2003. *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata
- Slamet, Margono. 2003. *Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Sudrajat, A dan Yustina, I. Bogor : IPB Press
- Suparta, Nyoman. 2001. *Perilaku Agribisnis dan Kebutuhan Penyuluh Peternak Ayam Ras Pedaging*. [disertasi]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
- Suradisastra, Kedi, Mick Blowfield dan Nizwar Syafa'at. 1995. "Pengkajian Sosial Antropologi Perikanan Melalui Rapid Appraisal of Fishery Information Systems (RAFIS)". Kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Natural resource Institute dan Marine Resource Evaluation and Planning Project
- Umar, Nasaruddin. 2008. "Mempertajam Visi Bimas Islam : Kalau Bukan Sekarang,Kapan ?, Kalau Bukan Kita, Siapa ?", *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia Vol. 1, No. 1*.
- Wang, Sun Ling. *Cooperative Extension System : Trends and Economic Impact on U.S Agriculture*. *Choices : The Magazine of Food, Farm and Resource Issues*. 1st Quarter. 2014. Vol. 29, (1). P. 1-8
- Winardi, J. 2005. *Pemikiran Sistemik dalam Bidang Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.